

ABSTRAK

Bentuk rasa sadar masyarakat Indonesia akan perlu adanya sebuah perlindungan terhadap segala macam resiko yang akan terjadi terhadap properti ataupun jiwa mereka dikemudian hari menyebabkan tingginya angka pengguna jasa asuransi. Kondisi gagal bayar yang dialami oleh PT Wanaartha Life bermula dari pemblokiran 800 sub rekening efek saham dan penyitaan aset terkait kasus yang dialami Jiwasraya yang menyeret PT Wanaartha Life. Akibatnya berujung pada penundaan pembayaran atas klaim yang diajukan oleh nasabah namun pihak PT Wanaartha Life memberikan keterangan bahwasanya pihaknya hanya menunda proses pembayaran klaim karena sedang dalam pemeriksaan dari pihak Kejaksaan Agung terkait keterlibatannya atas kasus korupsi yang dilakukan oleh PT Jiwasraya. Adanya Lembaga Penjamin Polis dirasa sangat diperlukan guna meningkatkan kepercayaan masyarakat dan menanggulangi kerugian para pemegang polis. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memaparkan langkah-langkah yang dilakukan terkait upaya perlindungan pemegang polis pada perusahaan asuransi dari sudut pandang perlindungan konsumen.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*).

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa penyelesaian Sebagaimana yang terjadi pada PT Jiwasraya yang mengalami gagal bayar karena adanya prosedur pembekuan rekening efek yang dilakukan oleh lembaga pengawas keuangan karena adanya dugaan kecurangan yang terindikasi dari laporan keuangan tahunan yang ada sehingga atas alasan pembekuan rekening tersebut telah menyebabkan PT. Jiwasraya telah tidak melakukan prestasi sebagaimana yang telah disepakati bersama. Bentuk perlindungan hukum yang diperoleh pemegang polis terkait adanya peristiwa dapat ditempuh melalui jalur litigasi dan jalur non litigasi.

Keywords : Perlindungan Hukum, Pemegang polis, Asuransi

ABSTRACT

A form of awareness of the Indonesian people will need a protection against all kinds of risks that will occur to their property or life in the future causing a high number of users of insurance services. The default condition experienced by PT Wanaartha Life stems from the blocking of 800 stock effect sub-accounts and the confiscation of assets related to the case experienced by Jiwasraya that dragged PT Wanaartha Life. As a result, it led to a delay in payment of claims submitted by customers but PT Wanaartha Life provided information that it only delayed the claim payment process because it was under investigation from the Attorney General's Office related to its involvement in corruption cases conducted by PT Jiwasraya. The existence of a policy guarantee institution is felt to be indispensable in order to increase public trust and bear the losses of the policyholders. Therefore, this study was conducted to describe the steps taken related to the protection of policyholders at insurance companies from the point of view of consumer protection.

The research method used is normative legal research (normative legal research). The approach taken is the statutory approach (Statutel Approach).

The results of this study indicate that the settlement as occurred in PT Jiwasraya which failed to pay due to the procedure for freezing the securities account carried out by the financial supervisory institution due to allegations of fraud indicated from the existing annual financial reports so that the reason for freezing the account has caused PT . Jiwasraya did not act as mutually agreed upon. Forms of legal protection obtained by policyholders related to events can be pursued through litigation and non-litigation.

Keywords : Legal Protection, Policy Depository, Insurance

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PEGANTAR	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACK	xi
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1. 1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Kegunaan Penelitian.....	7
1.5 Keaslian.....	7
1.6 Metode Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI ASURANSI, PEMEGANG POLIS, GAGAL BAYAR DAN TEORI PERTANGGUNGJAWABAN.....	14
2. 1 Asuransi.....	14
2. 2 Pemegang Polis.....	19
2. 3 Gagal Bayar	20
2. 4 Perlindungan Hukum	23

BAB III ANALISA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG	
POLIS YANG MENGALAMI GAGAL BAYAR.....	35
3.1 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLISI ATAS	
PERUSAHAAN ASURANSI YANG GAGAL BAYAR	35
3. 2 BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN TERKAIT PERISTIWA GAGAL	
BAYAR.....	39
3.3 UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS	
YANG MENGALAMI GAGAL BAYAR	45
BAB IV PENUTUP	65
4. 1 Kesimpulan.....	65
4.2 Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	69